

**ANALISIS PENGARUH REALISASI TARGET PENERIMAAN PAJAK,
GINI RASIO DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh :
SEPTI ARINISA
1611021020



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF TAX REVENUE TARGET REALIZATION, GINI RATIO AND OPEN UNEMPLOYMENT RATE ON POVERTY LEVEL IN INDONESIA

By
Septi Arinisa

This study aims to determine the effect of the Realization of Tax Revenue Targets, the Gini Ratio and the Open Unemployment Rate on the poverty rate in Indonesia in 2000-2021. This study uses time series data sourced from the Central Bureau of Statistics and the Ministry of Finance. This study uses the Error Correction Model or ECM analysis tool to see the effect of Realization of Tax Revenue Targets, the Gini Ratio and the Open Unemployment Rate on the Open Unemployment Rate in the short and long term. The result is that the Realization of Tax Revenue Targets has a significant positive effect in the short term and a significant negative effect in the long term. The Gini Ratio variable has a significant negative effect in the short term and a positive effect in the long term. The Open Unemployment Rate Variable has a significant positive effect both in the short and long term.

Keywords : Poverty Rate, Target Realization of Tax Revenue, Gini Ratio, Open Unemployment, Error Correction Model (ECM)

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH REALISASI TARGET PENERIMAAN PAJAK, GINI RASIO DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

**Oleh
Septi Arinisa**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Realisasi Target Penerimaan Pajak, Gini Rasio dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2000-2021. Penelitian ini menggunakan data *time series* yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan alat analisis *Error Correction Model* atau ECM untuk melihat pengaruh Realisasi Target Penerimaan Pajak, Gini Rasio dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hasilnya adalah Realisasi Target Penerimaan Pajak berpengaruh positif signifikan dalam jangka pendek dan berpengaruh negatif signifikan dalam jangka panjang. Variabel Gini Rasio berpengaruh negatif signifikan dalam jangka pendek dan berpengaruh positif dalam jangka panjang, Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif signifikan baik dalam jangka pendek maupun jngka panjang.

Kata kunci : Tingkat Kemiskinan, Realisasi Target Penerimaan Pajak, Gini Rasio, Pengangguran Terbuka, *Error Correction Model* (ECM)

**ANALISIS PENGARUH REALISASI TARGET PENERIMAAN PAJAK,
GINI RASIO DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**

Oleh

Septi Arinisa

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA EKONOMI

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

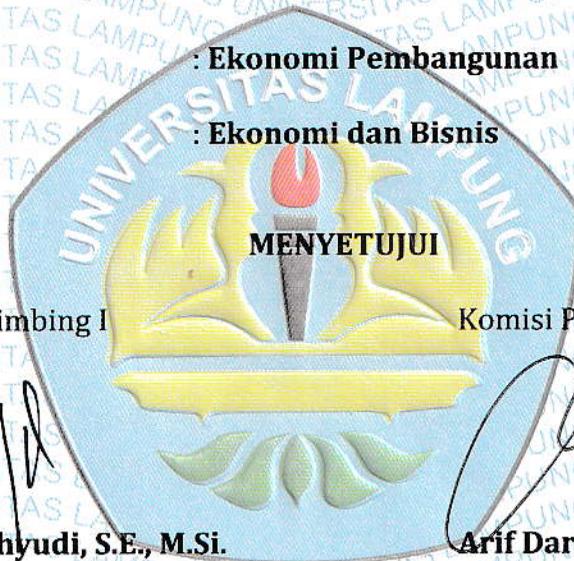
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH REALISASI TARGET
PENERIMAAN PAJAK, GINI RASIO DAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI
INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Septi Arinisa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1611021020**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

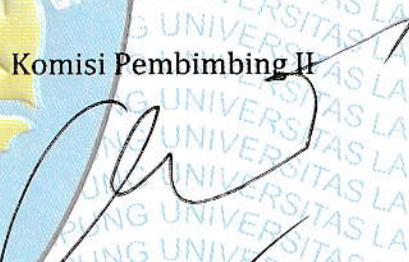
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Komisi Pembimbing I

Komisi Pembimbing II


Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.
NIP 19770212 200604 1 001


Arif Darmawan, S.E., M.A.
NIP 19900621 201903 1 010

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.

NIP 19631215 198903 2 002^{lv}

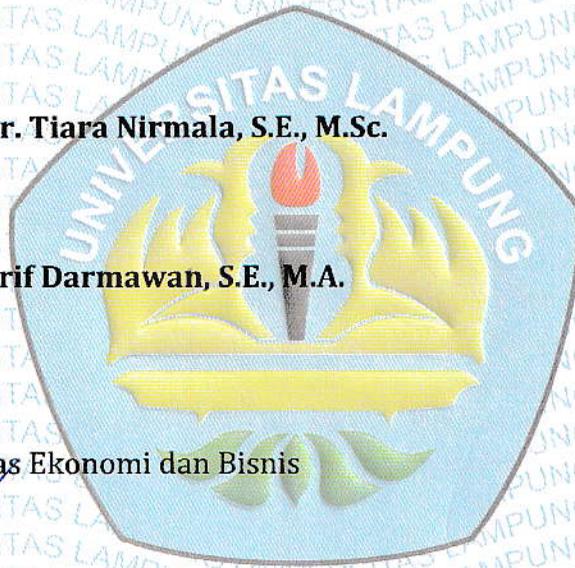
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.

Penguji I : Dr. Tiara Nirmala, S.E., M.Sc.

Penguji II : Arif Darmawan, S.E., M.A.



Three handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the main logo. The top signature is the most prominent, followed by two smaller ones below it.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Mei 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septi Arinisa

NPM :1611021020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pengaruh Realisasi Target Penerimaan pajak, Gini Rasio dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia" merupakan hasil karya saya sendiri . Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan yang saya ambil dengan cara mengambil atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya , atau yang saya ambil dari orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Juni 2023



Septi Arinisa

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Septi Arinisa anak pertama dari 3 bersaudara kandung, memiliki 2 orang adik laki-laki. Penulis lahir pada 22 September 1997 di Pematang-Jawa Tengah. Penulis bersekolah di SDN 02 Padek tahun 2004-2010 dilanjutkan jenjang SMP di SMP N2 Ulujami tahun 2010-2013 selama bersekolah penulis aktif dalam kegiatan ekstra kulikuler seperti PRAMUKA, PMI dan Silat. kemudian lanjut jenjang SMA di SMA N1 Comal tahun 2013-2016 aktif sebagai pengurus Organisasi Siswa Intera Sekolah (OSIS) tahun 2013-2015, serta banyak kegiatan sekolah lainnya. Penulis Masuk ke Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tahun 2016. Selama berkuliah penulis aktif dalam banyak kegiatan kemahasiswaan baik tingkat fakultas maupun tingkat universitas.

Penulis aktif sebagai pengurus ROIS FEB UNILA dari tahun 2017 hingga 2019. Dan aktif sebagai anggota Srikandi Forum Mahasiswa Studi Ekonomi Islam wilayah Sumbagsel. Penulis melakukan Kunjungan Kerja Lapangan (KKL) di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 2018. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang pada tahun 2020.

MOTTO

“Sesungguhnya Shalatku,Ibadahku,Kehidupanku dan Matiku hanyalah untuk
Allah Tuhan seluruh alam”

(QS. Al an'am ayat 162)

“Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya kepada Allah kita
kembali“

(Qs. Ali Imran ayat 185)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin,

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya ini saya persembahkan kepada :

Almarhumah mamaku serta keluarga yang memberikanku cinta dan kasih sayang, selalu mendoakanku dan selalu memberikan dukungan kepadaku.

Bapak Wiryono yang tidak pernah bangga dan bersyukur atas kehadiranku, semoga dengan ini menjadi hujjahku agar bisa mengangkat derajatmu dihadapan masyarakat dan Allah subhanahu wa ta'ala.

Abang Andri, Kakak Riski dan adik-adikku tersayang, Safri Didik Isnanto dan Dimas Rif'al Sidik Arba, terimakasih telah memberikan kasih sayang dan motivasi kepadaku.

Kupersembahkan tugas terakhir sarjana ini untuk sahabatku almarhum Anggi Wisnu Saputro dan ibu Semi Sariku sayang, serta adik kebanggaanku Yoga, semoga karya yang tidak sempurna ini mampu mengukir senyum dihati kalian.

Untuk sahabat-sahabatku Vio, Yana, Delly, Elita, Nisa dan yang tidak dapat kutuliskan satu per satu, semoga karya ini mampu menjadi jembatan kita untuk bertemu kembali dimasa depan yang membahagiakan.

Seluruh orang-orang terdekat, serta teman-teman seperjuangan. Terimakasih untuk semua dukungan, doa, semangat, waktu, dan motivasi disaat suka maupun duka.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Realisasi Target Penerimaan Pajak, Gini Rasio dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”** yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam menulis skripsi ini penulis banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi & akademik yang telah memberikan ilmu, motivasi, nasihat, serta waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan nasihat kepada penulis selama proses skripsi.
6. Bapak Dr. Tiara Nirmala, S.E., M.Sc., selaku dosen penguji dan pembahas yang telah memberikan waktu, ilmu, saran, dan nasihatnya yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis pada masa penulisan.
9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta yang menjadi alasan untuk terus berjuang .
10. Terima Kasih untuk Mbah kakung, bule,bude, om dan pakwo dari keluarga mama yang masih mendukungku untuk bermimpi setinggi langit.
11. Terima kasih kepada Abang Andri,Kakak Riski dan adik-adikku Didik & Dimas tersayang, yang selalu memberikan semangat, ilmu, motivasi, serta dukungan kepada penulis.
12. Terima Kasih untuk Nadilla tersayang yang selalu menyayangi penulis sepenuh hati.
13. Terima Kasih Bunda Emma, Fia, Om Andi dan Kak Tetty yang sudah memberikan sayang, cinta dan perhatian serta dukungan kepada penulis.
14. kepada Muhamad Khairul Islam untuk sabar dan lapangnya mengajarkan makna syukur dalam hidup kepada penulis.
15. Terima kasih kepada cabe-cabeku Vio, Yana, Delly, Rizki, Nisa, Erin semoga masa depan kita indah seperti yang selalu kita bayangkan saat gabut.
16. Dan Terima kasih teman EP 2016 dan EP 16 Akhir yang menjadi teman berjuang hingga akhir , sampai bertemu dimasa depan yang mapan.
17. Terima Kasih untuk Miss Rossy dan Miss Prety untuk waktu kerja yang singkat tapi terasa selalu dekat.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis dengan pahala dan berjuta keberkahan di dunia dan akhirat. Aamiin

Bandar Lampung, 1 Mei 2023

SEPTI ARINISA
1611021020

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Peran Pemerintah dalam Perekonomian	15
2.1.2 Tingkat Kemiskinan Penduduk	16
2.1.3 Penerimaan Pajak	17
2.1.4 Gini Rasio.....	18
2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	20
2.1.6 Hubungan Antar Variabel.....	21
2.2 Tinjauan Empiris.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
2.4 Hipotesis	25
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	27

3.2 Metode Analisis Data	28
3.3 Definisi dan Operasional Variabel	27
3.4 Metode Alat Analisis	29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Statistik Deskriptif	34
4.2 Hasil Pengujian Error Correction Model (ECM)	35
4.2.1 Uji Stasioneritas Data (Unit Root Test)	35
4.2.2 Uji Derajat Integrasi	36
4.2.3 Uji Kointegrasi	37
4.2.4 Estimasi Error Correction Model Engle-Granger	39
4.2.5 Uji Asumsi Klasik	42
4.2.6 Uji Hipotesis	46
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	52
V. KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Tinjauan Empiris.....	22
Tabel 3.1 Deskripsi Variabel, Simbol dan Sumber Data	26
Tabel 3.2 Interpretasi berdasarkan koefisien determinasi (R^2).....	32
Tabel 4.1 Hasil Deskripsi Statistik.....	33
Tabel 4.2 Hasil Uji Unit Root ADF Data Level.....	34
Tabel 4.3 Hasil Uji Derajat Integrasi ADF First Difference	35
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Jangka Panjang	36
Tabel 4.5 Hasil Uji Kointegrasi Engle-Granger.....	37
Tabel 4.6. Hasil Estimasi Jangka Pendek	39
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas	41
Tabel 4.8 Hasil Uji Linier	42
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	43
Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	43
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas	44
Tabel 4.12. Hasil Uji-T Jangka Panjang	45
Tabel 4.13. Hasil Uji-T Jangka Pendek	47
Tabel 4.14. Hasil Uji F-Statistik	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Presentase Kemiskinan di Indonesia	3
Gambar 2 Realisasi Target Penerimaan Pajak	5
Gambar 3 Realisasi Target Penerimaan Pajak terhadap Tingkat Kemiskinan.....	6
Gambar 4 Gini Rasio di Indonesia.....	9
Gambar 5 Gini Rasio terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	10
Gambar 6 Tingkat Pengangguran Terbuka	11
Gambar 7 Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.....	12
Gambar 8 Kerangka Pemikiran.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Tingkat Kemiskinan, Realisasi Target Penerimaan Pajak, Gini Rasio, Tingkat Pengangguran Terbuka.....	L1
Lampiran 2. Statistik Deskriptif	L2
Lampiran 3. Hasil Uji Stasioner (<i>Unit Root Test</i>) Pada Tingkat Level.....	L2
Lampiran 4. Hasil Uji Stasioner (<i>Unit Root Test</i>) Pada <i>First Defference</i>	L4
Lampiran 5. Hasil Uji Kointegrasi Jangka Panjang	L6
Lampiran 6. Uji Kointegrasi Engle-Granger	L7
Lampiran 7. Hasil Estimasi ECM Jangka Pendek.....	L8
Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas	L8
Lampiran 9. Hasil Uji Linieritas	L9
Lampiran 10. Hasil Uji Autokorelasi	L9
Lampiran 11. Hasil Uji Heterokedastisitas	L10
Lampiran 12. Hasil Uji Multikolinieritas.....	L10
Lampiran T tabel.....	L11

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa menurut Sensus BPS bulan September 2020, namun berkembang sangat pesat. peningkatan pendapatan yang sebanding. Banyak yang percaya bahwa penyebabnya adalah masalah dalam kehidupan sosial, baik secara politik maupun medis. Kemiskinan merupakan salah satu masalah pertumbuhan penduduk, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia.

Menurut buku Teori Kependudukan Agustina Bidarti (2020) masalah kependudukan juga bisa disebut masalah sosial karena terjadi dalam setting sosial atau masyarakat. Masalah kependudukan dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan merupakan salah satu contoh masalah yang timbul sebagai akibat dari masalah kependudukan, dimana kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang atau keluarga tidak mempunyai sumber penghidupan dan/atau memiliki sumber penghidupan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Bank Dunia (2010) melaporkan bahwa hampir 69% penduduk miskin tinggal di pedesaan dan mayoritas bekerja sebagai petani yang pekerjaannya bersifat informal. Pengurangan kemiskinan merupakan program SDG yang disepakati oleh 193 negara di Majelis Umum PBB pada 25 September 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi sebagian besar negara di dunia. Bank Dunia menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatannya per kapitanya kurang dari sepertiga dari rata-

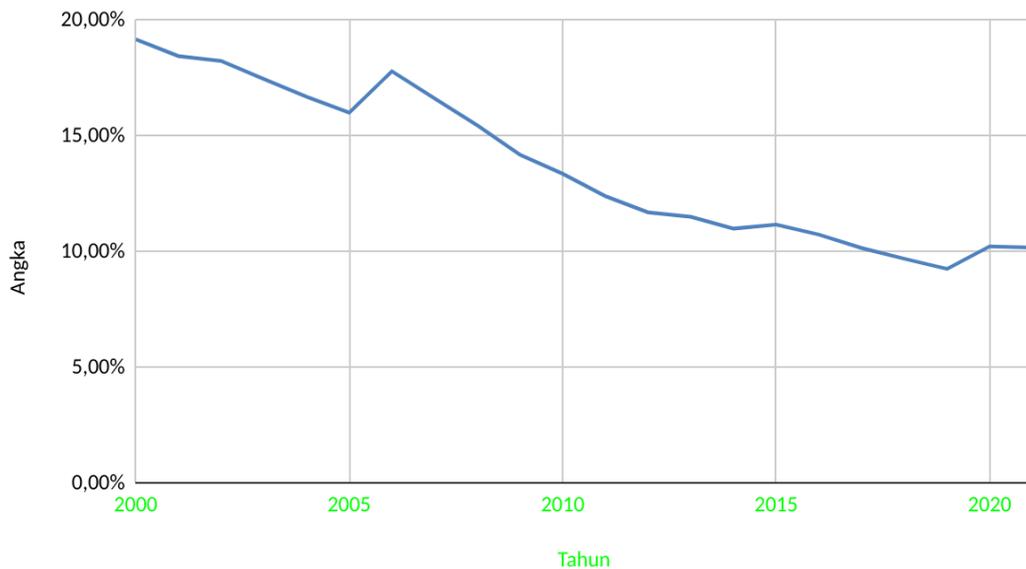
rata pendapatan per kapita nasional didefinisikan sebagai orang miskin. Menurut Bank Dunia, ambang kemiskinan adalah US\$2 per orang per hari. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok yang diukur dengan pengeluaran.

Orang dianggap miskin jika pengeluaran mereka di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah dari pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama satu bulan, baik makanan maupun non makanan. Kemiskinan menggambarkan situasi kekurangan yang muncul bukan karena orang miskin menginginkannya, tetapi karena tidak dapat dihindari oleh kekuatan mereka (Soegijanto Soegijoko, 1997).

Penyebab kemiskinan dapat dikaitkan dengan kondisi alam dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi budaya. Kemiskinan alam dan ekonomi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, manusia dan sumber daya lainnya, membuat peluang produktif relatif kecil dan tidak relevan dengan pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial adalah hasil dari ketidaksetaraan pembangunan, institusi dan politik. Kemiskinan budaya, sebaliknya, disebabkan oleh sikap dan gaya hidup yang dianggap cukup untuk membuat seseorang tetap miskin. Penyebab kemiskinan ada di dalam dan di luar orang miskin. Penyebab internal meliputi rendahnya kualitas personel dan sikap pribadi. Penyebab eksternal, di sisi lain, meliputi keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, dan persaingan yang meminggirkan kaum miskin. Jenis kemiskinan dapat dibedakan menurut pola waktu: (1) kemiskinan yang terus-menerus, yaitu kemiskinan kronis atau genetik, yang merupakan wilayah yang sangat penting untuk sumber daya alam atau terisolasi; (2) Kemiskinan siklis, Kemiskinan yang mengikuti pola seluruh siklus ekonomi. (3) kemiskinan musiman, yang umum di kalangan nelayan

dan petani subsisten; (4) kemiskinan yang tidak disengaja, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau dampak kebijakan;

Presentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 1. Persentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2000-2021(%)

Kemiskinan di Indonesia sendiri masih menjadi masalah terbesar negara yang belum diselesaikan oleh pemerintah, namun angka kemiskinan di Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun, dan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan menunjukkan hasil. Tingkat kemiskinan perkotaan Indonesia turun dari 7,60% pada September 2021 menjadi 7,50% pada Maret 2022. Sementara itu, tingkat kemiskinan pedesaan turun dari 12,53% pada September 2021 menjadi 12,29%. Dapat kita lihat bahwa angka kemiskinan tertinggi adalah 19% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2000 dan angka kemiskinan terendah adalah 9,22% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2019.

Menurut Yulianto Kadji (2013), kelompok masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan pada umumnya adalah petani, petani kecil, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima, pemulung, gelandangan dan pengemis (gepeng) dan pengangguran. Jika orang-orang miskin

ini tidak ditanggapi dengan serius, mereka akan terus menimbulkan masalah kemiskinan kultural dan struktural, terutama bagi generasi berikutnya. Umumnya masyarakat yang tergolong miskin adalah kelompok sisa desa, program-program peningkatan pendapatan petani dan nelayan, NKKBS, KUD, PKK, dll. Grup ini sulit dijangkau. Kualitas sumber daya langka dan kelompok ini sulit dijangkau. Oleh karena itu, mereka tidak menggunakan fasilitas yang mengandung faktor produksi. Mereka juga tidak memiliki keterampilan, berpendidikan rendah, memiliki sedikit pelatihan, termasuk mencari bantuan untuk kebutuhan dasar manusia, dan perlindungan hukum atau hukum yang tidak merugikan mereka juga tidak mereka dapatkan.

Kriteria lain terkait kemiskinan terkait dengan pelaksanaan Program Pembangunan Kecamatan (PPK) menurut versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mensyaratkan minimal 6 memenuhi satu kriteria:

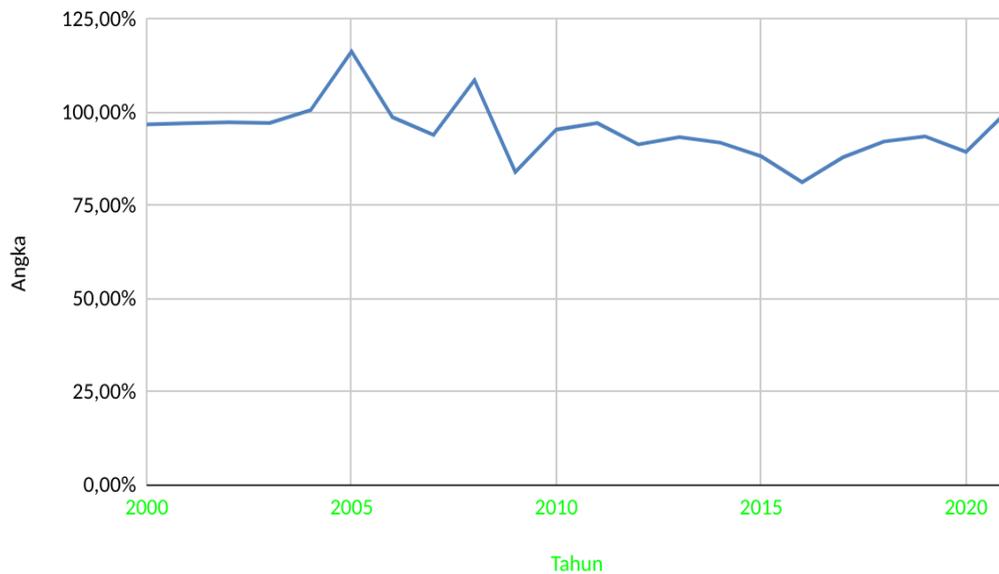
1. Rumah layak huni: a) milik sendiri dan b) bukan milik sendiri.
2. Akses air bersih dan sanitasi.
3. Pendapatan/dikonversi dengan pengeluaran.
4. Kepemilikan aset.
5. Frekuensi makan (lebih dari 2 kali sehari) dan kualitas gizi makanan.
6. Dalam setahun dapat membeli minimal 1 stel pakaian baru.

Dari 6 (enam) variabel/kriteria tersebut jika mendapat skor 3 atau lebih maka keluarga tersebut dikategorikan miskin. Oleh karena itu, penulis menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat dalam penelitian ini untuk mengetahui komitmen dan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan pembangunan sosial.

Penelitian oleh Shandy Jennifer Matitaputti (2020) menemukan hubungan negatif yang signifikan antara penerimaan pajak dan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, masyarakat akan lebih sejahtera jika penerimaan pajak meningkat karena perbaikan sarana dan prasarana publik untuk mendukung pengelolaan ekonomi masyarakat, seperti pajak sebagai fungsi anggaran dalam UU KUP No. 28. 2007, Pasal 1. mendefinisikan pajak sebagai: Ongkos iuran pembiayaan rakyat ke kas negara sesuai dengan undang-undang (enforceable) tanpa mendapat pelayanan

yang langsung terlihat dan dapat digunakan untuk tujuan (oposisi performance).

Realisasi Target Penerimaan Pajak terhadap APBN di Indonesia



Sumber: Kemenkeu.go.id. 2021.

Gambar 2. Realisasi Target Penerimaan Pajak Terhadap APBN Tahun 2000-2021(%)

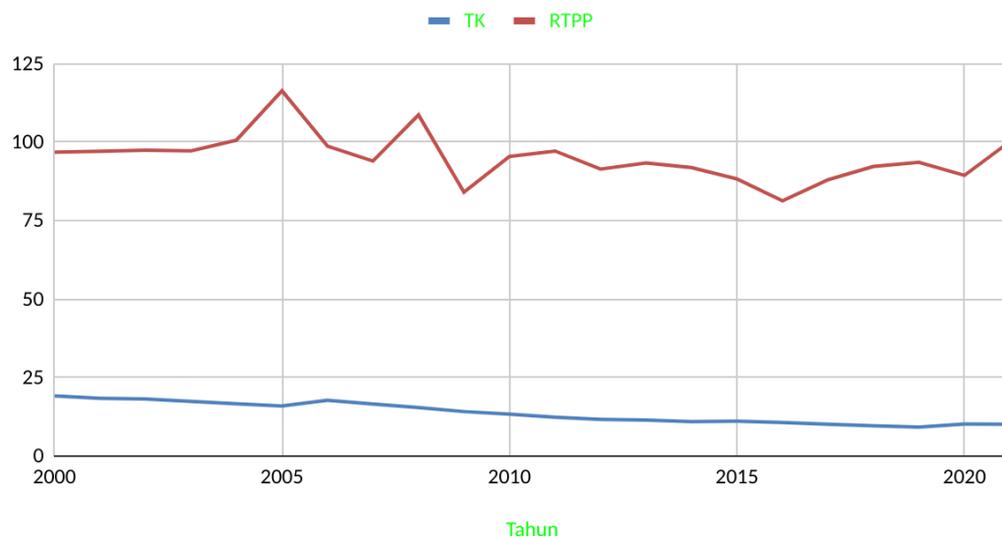
Pajak menjadi alat ekonomi yang krusial bagi negara manapun, namun sebagian besar penelitian beberapa studi pajak diselidiki dari pemerintahan pemerintah perspektif. Pemerintahan yang baik diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintahan yang baik dilaksanakan dengan menegakkan transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Komitmen ini berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, termasuk kepatuhan membayar pajak. Tata kelola yang baik sekarang dibutuhkan di banyak negara sebagai syarat untuk menyediakan dana dan sumber daya (Santiso, 2001).

Tata kelola yang baik merupakan syarat bagi pembangunan ekonomi suatu negara (Riddell, 2009) dan mencerminkan tindakan pemerintah yang membangun demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik. Sangat menarik untuk mempelajari dampak praktik administrasi publik terhadap kepatuhan pajak. Jika masyarakat percaya dan puas dengan pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur dan barang-barang berkualitas lainnya, penegakan hukum

yang adil dan upaya pemberantasan korupsi yang bermartabat, maka akan mendorong masyarakat untuk membayar pajak.

Realisasi target penerimaan perpajakan merupakan ukuran pencapaian target seluruh penerimaan pemerintah yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana tercantum dalam APBN tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 116% dari target APBN dan realisasi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 81% dari target APBN. Kami memilih variabel ini untuk melihat bagaimana tindakan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.

RTPP terhadap TK



Sumber: Kemenkeu, BPS, 2021.

Gambar 3. Realisasi Target Penerimaan Pajak terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2000-2021.

Penerimaan pajak berkontribusi besar dalam penerimaan negara. Misalnya, di Indonesia, dari tahun 2007 hingga 2019, lebih dari 70% pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Penerimaan pajak pemerintah Indonesia pada tahun 2019 adalah Rp 1.545,3 triliun, merupakan 78,9% dari total penerimaan negara. Penerimaan sebesar itu dari departemen pajak nantinya akan digunakan sebagai sumber dana pembangunan. Oleh karena itu, pajak diharapkan pada akhirnya bermanfaat bagi

kesejahteraan masyarakat.

Harapan bahwa pajak akan membantu membangun kesejahteraan sosial inilah yang mendorong masyarakat untuk taat pajak secara selektif. Penerimaan pemerintah sebagian besar berasal dari pajak yang dikelola oleh APBN untuk menjamin kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Namun dalam praktiknya pengimplementasian peran pajak dalam mengentaskan kemiskinan sulit dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Inilah yang menjadi dilema apakah benar pajak berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. (Matitaputty et al., 2021)

Salah satu ukuran kemakmuran rakyat adalah pendapatan per kapita. Karena pendapatan per kapita dihitung dengan memperhitungkan jumlah penduduk, maka dapat digunakan untuk mengukur pendapatan nasional dan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita cukup mewakili jantung pembangunan: peningkatan kemakmuran dan pengentasan kemiskinan. Namun muncul masalah dalam pendapatan yakni, ketimpangan pendapatan yang tidak merata menyebabkan sulitnya meningkatkan kesejahteraan secara merata. Di era otonomi daerah sekarang ini, di mana setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga akan mendorong terciptanya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik dan disertai pertumbuhan ekonomi yang baik pula (Wahyudi et al., 2022)

Neneng Oktaviani, dkk dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel ketimpangan distribusi pendapatan dan perubahan tingkat kemiskinan adalah positif, ketika ketimpangan naik, tingkat kemiskinan juga naik, dan sebaliknya. Kemiskinan juga dapat dibedakan melalui perbandingan dengan suatu ukuran tertentu atau dengan anggota/kelompok masyarakat lainnya.

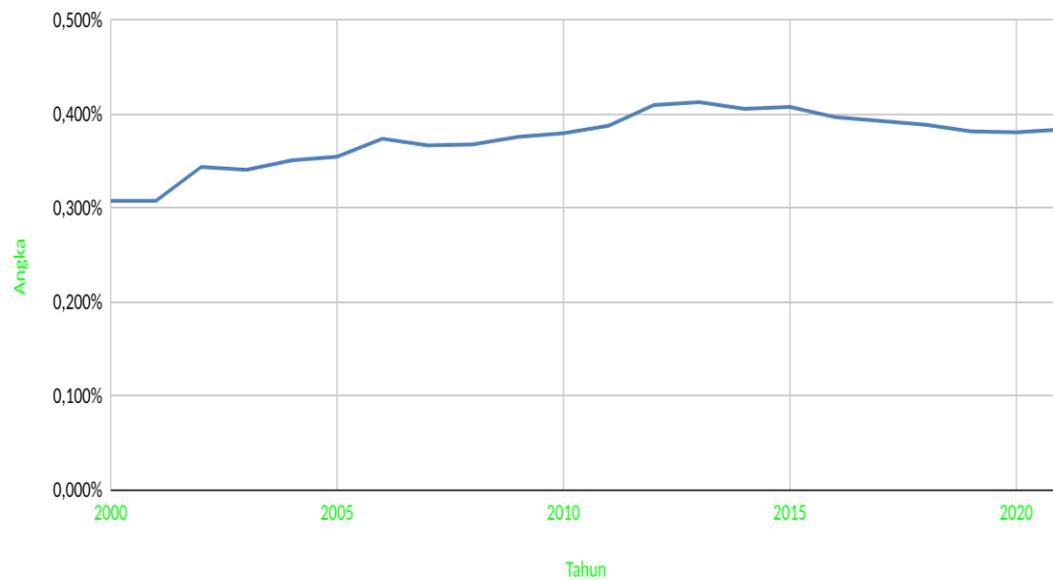
Ukuran kemiskinan absolut dengan menggunakan garis kemiskinan atau kondisi kondisi tertentu yang mencerminkan situasi kemiskinan. Sedangkan ukuran kemiskinan relatif dengan membandingkan dengan jumlah keseluruhan kelompok dan dapat digambarkan melalui Kurva Lorentz dan menggunakan Gini Ratio untuk mengetahui besarnya kesenjangan. Strategi pengentasan kemiskinan yang

dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.

Strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yang dikutip Andre Bayo Ala (1981) meliputi: (1) strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya; (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. Juga, orang miskin memiliki strategi mereka sendiri untuk mengatasi kemiskinan. Strategi yang ditempuh antara lain meminjam uang dari lembaga informal, bekerja lebih lama, bekerja dengan anggota keluarga, pindah rumah, atau menabung.

Gini Rasio di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 4. Gini Rasio di Indonesia tahun 2000-2021(%)

Koefisien Gini memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang lengkap atau absolut ketika seluruh penduduk menempati satu tempat di negara itu dan tidak ada penduduk di daerah lain. Nilai 0 menunjukkan persamaan mutlak. Artinya, populasi tersebar secara ideal di seluruh negeri. Oleh karena itu, semakin besar nilai koefisien konsentrasi gini maka semakin besar pula kesenjangan antara sebaran penduduk dengan jumlah lokasi. Indonesia memiliki koefisien Gini tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,413%.

Penelitian Gek Ayu Nina, Surya Dewi Rustariyuni (2018) yang berjudul Pengaruh gini rasio, pengeluaran makanan non makanan dan belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi Bali dan Muhammad Arif (2015) yang berjudul Pengaruh pendapatan terhadap kemiskinan dan pengangguran dengan inflasi sebagai moderasidi Sumatera Utara menyatakan bahwa Gini Rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

GR terhadap TK



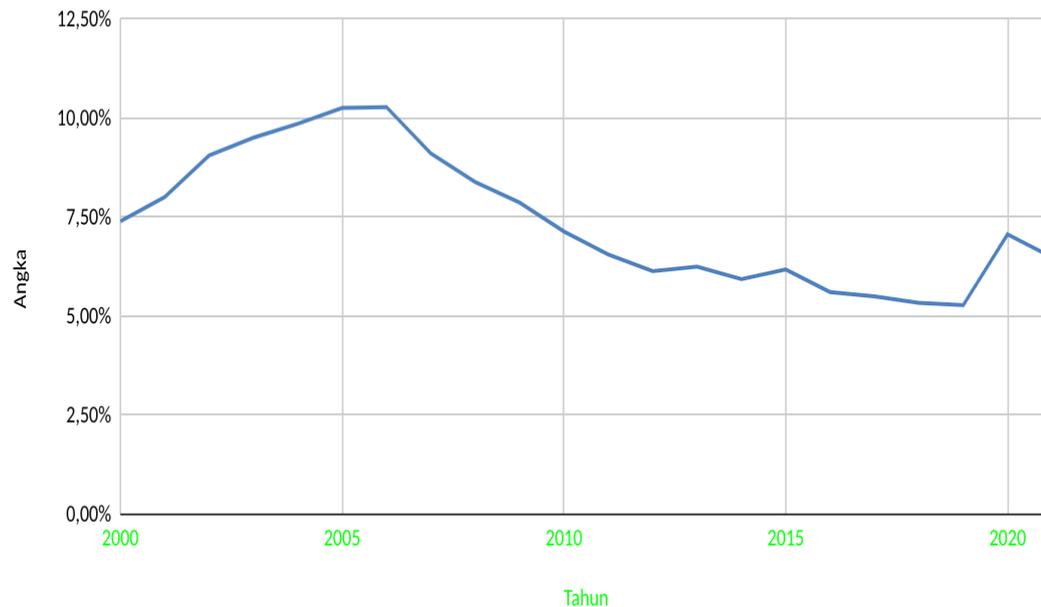
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 5. Gini Rasio terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, tahun 2000-2021.

Indeks Gini Indonesia tetap tinggi karena sebagian besar pertumbuhannya didorong oleh industri ekstraktif. Ada penambangan legal, tetapi ada juga penambangan ilegal. perkebunan juga. “Kesenjangan gaji semakin lebar,” Poltak Holtadero.

Menurut Dia Retnowati dan Harsuti, penelitian mereka “Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2014” menunjukkan bahwa pengangguran berdampak positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah peningkatan kemiskinan. Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : (1) Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. (2) Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. (3) Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

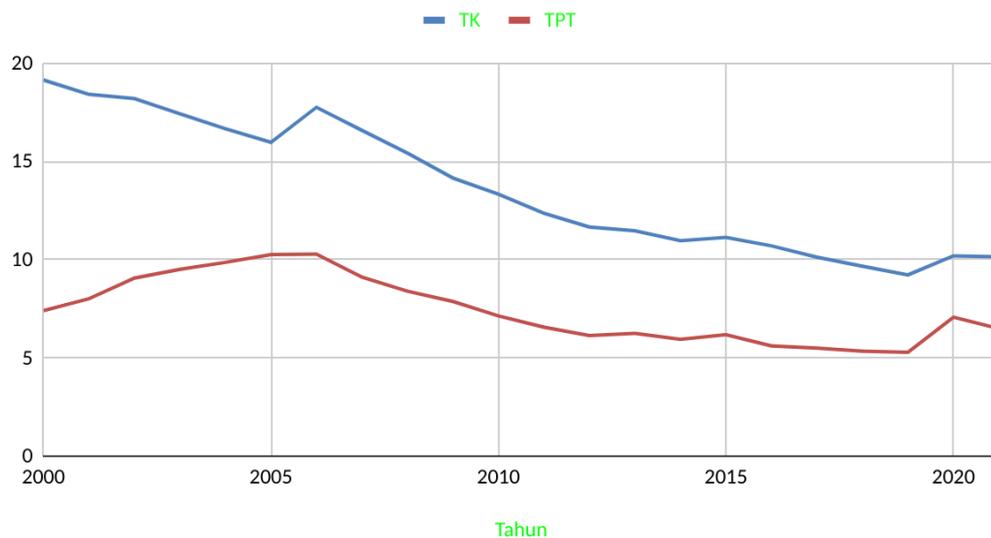
Gambar 6. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia (%)

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dalam banyak cara. Ketika mobilitas rumah tangga terbatas yaitu konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, pengangguran diukur dalam pendapatan tingkat kemiskinan pendapatan dan konsumsi, yang secara langsung berdampak pada kemiskinan baik dalam kemiskinan khusus tingkat kemiskinan konsumsi. Jika rumah tangga tidak kekurangan uang (yaitu, konsumsi saat ini tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan saat ini), peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak banyak dalam jangka pendek menjadi lebih kecil.

Tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2006 yang mencapai 10% dari total penduduk Indonesia. Pengangguran juga membebani ekonomi suatu negara, mempengaruhi praktik pembangunan nasional dalam jangka pendek dan panjang. Salah satu bentuk pengangguran adalah pengangguran terbuka. Pengangguran yang diungkapkan adalah angkatan kerja yang sebenarnya tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran di Indonesia masih relatif tinggi

sekitar 5,34%. Mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia masih menjadi isu utama bagi pemerintah (Elia & Marselina, 2023)

TPT terhadap TK



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2021.

Gambar 7. Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, tahun 2000-2021.

Pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam angkatan kerja dan aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran biasanya diklasifikasikan menjadi tiga jenis, tergantung pada keadaan yang menyebabkannya: Mereka adalah pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran siklis.

Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka terjadi ketika pertumbuhan jumlah tenaga kerja tidak sesuai dengan potensi lapangan kerja dan banyak tenaga kerja yang menganggur. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran yang tidak diungkapkan adalah mereka yang telah memasuki pasar tenaga kerja tetapi menganggur, sedang mencari pekerjaan, bersiap untuk memulai usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi masih mencari pekerjaan. Ini adalah populasi yang belum dimulai.

Pengangguran Tersembunyi Situasi dimana pekerja terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berlebihan. Pengangguran Musiman Pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Fenomena ini dapat terjadi di lahan pertanian yang mengakibatkan petani kehilangan pekerjaan saat menunggu musim tanam padi dan saat jeda antara musim tanam dan panen padi.

Setengah Pengangguran Pengangguran didefinisikan sebagai tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena kurangnya pekerjaan atau pekerjaan atau pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jam kerja normal di Indonesia adalah 35 jam. Indeks pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran yang dipublikasikan untuk melihat keterkaitan antara kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan “Analisis Pengaruh Realisasi Target Penerimaan Pajak, Gini Rasio dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Realisasi Target Penerimaan Pajak(RTPP) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Gini Rasio(GR) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Realisasi Target Penerimaan Pajak(RTPP), Gini Rasio(GR),Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pengaruh Realisasi Target Penerimaan Pajak(RTPP) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Gini Rasio(GR) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
4. Untuk menganalisis Pengaruh Realisasi Target Penerimaan Pajak(RTPP), Gini Rasio(GR),Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan Memberikan Masukan mengenai pengaruh Realisasi Target Penerimaan Pajak(RTPP), Gini Rasio(GR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat maupun *stakeholder* mengenai Realisasi Target Penerimaan Pajak(RTPP),Gini Rasio(GR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
3. Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan referensi penulis lain dalam penelitian mengenai Realisasi Target Penerimaan Pajak(RTPP), Gini Rasio(GR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
4. Dapat dijadikan bahan masukan dalam pembangunan terutama mengenai Realisasi Target Penerimaan Pajak(RTPP), Gini Rasio(GR),dan Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Adam Smith, seorang ahli ekonomi kapitalis, berpendapat bahwa ekonomi riil mengatur dan menyeimbangkan dirinya sendiri karena ekonomi dikendalikan oleh "tangan tak terlihat". Menurut John Maynard Keynes, pemerintah hanya memiliki tiga fungsi selama periode ini. menjaga keamanan dan pertahanan nasional; mengatur sistem peradilan; menyediakan pasokan yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta; dan pembangunan yang lebih luas. Masalah yang Anda hadapi sangat kompleks dan melibatkan banyak hal. John Mayard Keynes berpendapat bahwa dalam ekonomi modern pemerintah dapat bertindak sebagai "tangan tak terlihat" sebagai pengatur sistem ekonomi.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengurangi konflik kepentingan dalam perekonomian yang tidak dapat diselesaikan oleh sektor swasta dan mekanisme pasar, serta memungkinkan perekonomian berjalan secara harmonis dan teratur. Tugas pemerintah dalam sistem ekonomi modern adalah:

- a. Peran alokasi Peran alokasi pemerintah dalam hal ini adalah mengalokasikan faktor-faktor produksi dan kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa yang tidak dapat dipenuhi secara efektif oleh mekanisme pasar. Contohnya termasuk pendidikan, keadilan, keamanan nasional dan pertahanan.
- b. Peran distribusi Peran distribusi dalam hal ini adalah negara mengatur dan mendistribusikan distribusi pendapatan masyarakatnya.

- c. Peran Stabilitas Peran stabilitas yaitu peran pemerintah sebagai pencipta dan pemelihara stabilitas ekonomi, kebijakan sosial, keadilan, pertahanan dan keamanan.

2.1.2 Tingkat Kemiskinan Penduduk

Bank Dunia menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Ambang batas kemiskinan Bank Dunia adalah \$2 per orang per hari, karena penduduk dengan pendapatan per kapita kurang dari sepertiga pendapatan rata-rata per kapita didefinisikan sebagai miskin. Tingkat kemiskinan diperhitungkan berdasarkan kriteria terpilih, yang sangat penting untuk pengukuran berbasis konsumsi (garis kemiskinan berbasis konsumsi).

Bank Dunia (2010) memberi judul laporannya *The Case for Human Development*, mengakui bahwa Negara Anggota PBB tidak hanya ada di bidang ekonomi, dan tidak hanya di bidang ekonomi. “Hampir diterima secara universal bahwa mengurangi kelaparan, menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan pendidikan dasar adalah tujuan penting dalam diri mereka sendiri.”, bahkan lebih penting untuk memprioritaskan aspek pendidikan secara umum. Manfaat bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi mereka.

Kemiskinan merupakan aspek kesejahteraan sosial yang sulit dicapai, karena merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia. Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang atau keluarga tidak memiliki sumber penghidupan dan/atau memiliki sumber penghidupan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang cukup untuk kelangsungan hidup diri dan/atau keluarga.

Menurut Bank Dunia (2010), salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan yang layak dan pendidikan. Dalam arti yang lebih luas, kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan ketidakmampuan baik individu, kelompok maupun keluarga, yang menjadi predisposisi masalah sosial lainnya

(Rustanto, 2015). Kemiskinan adalah masalah bagaimana orang miskin merasa dapat mengatasi kehidupan dan mempertahankan harga diri mereka (Markum, 2009). Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, karena dengan munculnya kemiskinan muncul masalah di bidang lain seperti sosial, kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, tidak hanya masalah fisik yang muncul, tetapi juga masalah psikologis (Liputo, 2014). Menurut Sharp et al (1997) dalam Kuncoro (2006) kemiskinan memiliki tiga penyebab. yakni:

1. Pada tingkat mikro, kemiskinan muncul dari ketimpangan kepemilikan sumber daya yang berujung pada ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Kemiskinan muncul dari perbedaan kualitas sumber daya manusia.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Selama ini negara berkembang masih memiliki kekhasan, terutama kesulitan dalam mengelola pasarnya sendiri agar dapat bersaing sempurna. Soetrisno (1990) berpendapat bahwa munculnya kemiskinan berkaitan dengan budaya masyarakat yang sudah ada sebelumnya, ketimpangan kepemilikan faktor produksi, dan model pendekatan pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Supriatna (1997) mengemukakan lima ciri orang miskin:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan yang rendah pada umumnya.
4. Banyak yang tidak memiliki fasilitas.
5. Tidak memiliki skill atau keterampilan yang memadai.

2.1.3 Penerimaan Pajak

Kebijakan fiskal pemerintah karena kenaikan atau penurunan pendapatan atau anggaran nasional. Pemerintah memiliki kekuatan untuk menetapkan jumlah anggaran dan pendapatan untuk dibelanjakan pada program tertentu. Menurut teori John Maynard Keynes, kebijakan ini harus mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi di dalam negeri. Komponen kebijakan fiskal meliputi:

1. Kebijakan Perpajakan

2. Kebijakan Pengeluaran
3. Kebijakan investasi dan disinvestasi
4. Pengelolaan Utang atau Surplus

Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan hukum yang diamanatkan oleh undang-undang karena tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan sesuai dengan kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga negaranya. Nomor 28 Tahun 2007). Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara. Indonesia adalah negara di mana pajak merupakan sumber pendapatan terbesar, dengan pajak migas dan nonmigas mencapai lebih dari 80%.

Pajak APBN dirancang untuk mendanai alokasi dan distribusi ke berbagai departemen, mulai dari pembangunan hingga gaji PNS. Peran taman peruntukan adalah untuk menyediakan barang publik seperti jalan dan jembatan. Tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran. Sedangkan fungsi distribusi adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerataan pembangunan secara adil. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Indonesia dan pemanfaatannya digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat sedapat mungkin. Penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini merupakan angka kunci realisasi penerimaan pajak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021.

2.1.4 Gini Ratio

Isu keberhasilan pembangunan tidak lepas dari pembahasan ketimpangan. Karena ketimpangan sering dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, sebagaimana dijelaskan Dudley Sear bahwa penurunan perbedaan pendapat merupakan indikator penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Keberhasilan pembangunan daerah (Todaro dan Smith, 2003). Hubungan antara pembangunan dan ketimpangan pendapatan telah menjadi fokus penelitian selama bertahun-tahun. Simon Kuznets memulai penelitiannya dengan meneliti korelasi antara kedua variabel tersebut (Ray, 1998). Kuznets (1995), dalam buku acuannya yang belakangan bagi banyak peneliti, mengungkapkan bahwa hubungan antara tingkat distribusi pendapatan dan tingkat pembangunan ekonomi berbentuk kurva

U terbalik. Dengan kata lain, pada tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun, saat ekonomi semakin matang, ketimpangan pendapatan memuncak dan kemudian secara bertahap menyempit.

Koefisien Gini, atau rasio Gini, adalah ukuran yang dikembangkan oleh seorang kalkulus Italia bernama Corrado Gini dan diterbitkan dalam karyanya tahun 1912 *Variabilita e mutabilita*. Faktor ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan-kekayaan, atau tingkat ketimpangan pengeluaran secara keseluruhan dalam persentase. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara meliputi pendapatan dan pengeluaran masyarakat, dan ketimpangan yang ada diukur dengan menggunakan rasio Gini (Pratowo, 2013). Koefisien Gini didefinisikan sebagai :

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (P_i - P_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$$

Dimana :

P_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i

Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i

n =Jumlah observasi Indeks

Koefisien Gini dan Kurva Lorenz Parameter lain yang biasa digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan adalah rasio Gini, disebut juga indeks Gini atau rasio konsentrasi Gini lengkap. Indeks Gini/rasio Gini adalah teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan alat ukur ini adalah dapat dinyatakan secara geometris, sehingga memiliki aspek visual dan aspek matematis sekaligus dengan sebuah kurva yang disebut kurva Lorentz.

Ukuran celah ini juga memenuhi properti ukuran celah yang diinginkan, tetapi berbeda dengan indeks Theil, indeks Gini tidak dapat didekomposisi menjadi bagian yang dapat diselesaikan secara aditif. Rasio gini sebagai ukuran distribusi pendapatan berkisar antara 0 (nol) dan 1 (1). Rasio gini 0 (nol) menunjukkan rendahnya ketimpangan (pemerataan sempurna) dalam distribusi pendapatan. Sebaliknya, nilai 1 (1) menunjukkan ketimpangan yang tinggi (ketimpangan total). Tetapi seperti dikatakan oleh ekonom pembangunan Italia Michael Todaro:

1. Gini Ratio terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.
3. Sementara apabila terletak diantara 0,20 – 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

Indeks Gini dapat diilustrasikan secara visual menggunakan kurva Lorenz, kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu (seperti pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif populasi. Sumbu horizontal memplot persentase kumulatif populasi, diurutkan dari termiskin ke terkaya, dan sumbu vertikal memplot persentase kumulatif pengeluaran. Indeks Gini adalah rumus yang menghitung rasio luas antara diagonal (ekuivalen sempurna) dengan kurva Lorenz. Semakin besar jarak antara kurva Lorenz dan diagonal, semakin besar jaraknya.

2.1.5 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah keadaan dimana orang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan. Akar penyebab pengangguran adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilan pelamar. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran dari total angkatan kerja. Semakin tinggi persentase ini, semakin tinggi jumlah pengangguran. Tingkat pengangguran yang rendah merupakan indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang tinggi diartikan sebagai memburuknya situasi ekonomi negara. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang menganggur terhadap total angkatan kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak pengangguran dan semakin sedikit pengangguran. Karyawan non-penuh waktu adalah karyawan yang bekerja kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu.

Jenis-Jenis Pengangguran, Adapun pengangguran berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 4. Yaitu:

1. Pengangguran Friksional

Pengertian dari pengangguran friksional adalah keadaan dimana suatu wilayah tingkat penganggurannya mencapai 2 atau 3 persen dari total tenaga kerja. Pengangguran friksional disebut juga sebagai pengangguran normal, karena pengangguran yang dimaksud bukan tidak dapat memperoleh pekerjaan, melainkan sedang mencari pekerjaan yang dinilai lebih baik dari sebelumnya.

Tawaran pekerjaan yang lebih nyaman, gaji yang lebih besar, dan tawaran tunjangan atas pekerjaan menjadi pertimbangan para pekerja memilih untuk resign. Biasanya hal ini terjadi untuk mereka mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan yang lebih besar dengan tawaran gaji lebih besar. Hal lain yang menjadi pertimbangan mungkin dikarenakan pekerjaan yang baru nantinya akan lebih sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Pekerja yang memilih mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang lebih baik menjadikannya berstatus sebagai pengangguran friksional atau pengangguran normal.

2. Pengangguran Siklikal

Dalam dunia industri, tidak selamanya permintaan akan produksi selalu tinggi. Ada kalanya daya beli konsumen menurun dan menyebabkan produksi atas barang atau jasa juga ikut menurun. Harga-harga juga akan ikut menurun karena sepi peminat. Keadaan seperti ini mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi pekerja. Sebab, tidak mungkin untuk mempertahankan jumlah karyawan yang tidak sebanding dengan permintaan konsumen atas barang atau jasa. Kerugian yang dialami terus menerus sedangkan mereka juga harus menggaji karyawan. Akibatnya perusahaan berusaha mengurangi jumlah karyawannya untuk meminimalisir kerugian tersebut. Pekerja atau karyawan yang terkena pengurangan tersebut disebut dengan pengangguran siklikal.

3. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural merupakan kondisi dimana munculnya pengangguran karena perubahan struktur dalam kegiatan perekonomian pada suatu masa. Hal ini terjadi ketika kemunduran ekonomi pada industri atau perusahaan yang disebabkan

karena adanya tingginya persaingan usaha. Itu menyebabkan beberapa pengusaha tersisih, biaya pengeluaran yang terlampaui tinggi, kerugian yang dialami oleh perusahaan karena menurunnya kegiatan ekspor, dan munculnya barang kompetitor dari pihak lain. Hal ini menyebabkan usaha tersebut harus dikurangi atau mungkin ditutup. Dampaknya pekerja akan menganggur. Hal inilah yang dinamakan dengan pengangguran struktural.

4. Pengangguran Teknologi

Penggunaan teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Pekerjaan yang sebelumnya dijalankan oleh manusia lambat laun digantikan oleh kecanggihan teknologi yang disebut dengan robot.

2.1.6 Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan antara penerimaan pajak (PP) dan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Berdasarkan penelitian Iman Akhadi (2022) Pengaruh penerimaan pajak terhadap variabel pendapatan perkapita dan angka kemiskinan sebagai indikator kemakmuran rakyat menyatakan Pajak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan penelitian Shandy Jennifer Matitaputty, dkk(2020) juga mengatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka penulis berasumsi bahwa Realisasi Target Penerimaan Pajak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara penerimaan pajak dan tingkat kemiskinan. Pendapatan pajak yang lebih tinggi menurunkan tingkat kemiskinan. Penerimaan pajak pemerintah pada tahun 2019 mencapai Rp 1.543,3 triliun dengan total kontribusi terhadap APBN sebesar 78,9%. Penerimaan pajak yang tinggi tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan dan secara tidak langsung mengurangi kemiskinan.

2. Hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan (rasio gini) dengan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Menurut Todaro (2000), dampak ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah

penduduk miskin. Studi Gek Ayu Nisa (2018) menemukan tidak adanya pengaruh antara variabel rasio gini terhadap jumlah penduduk miskin.

3. Hubungan antara pengangguran terbuka di Indonesia dan angka kemiskinan penduduk. Indah Purboningtyas, dalam penelitian berjudul “Menganalisis dampak publikasi angka pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Jawa Tengah”, menemukan bahwa publikasi angka pengangguran berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan pada periode 2010-2019. menemukan itu Ada di Jawa Tengah.

2.2 Tinjauan Empiris

Table 2.1 Tinjauan empiris

No	Peneliti dan Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Iman Akhadi (2022) Pengaruh penerimaan pajak terhadap variabel pendapatan perkapita dan angka kemiskinan sebagai indikator kemakmuran rakyat	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Pajak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan namun berpengaruh positif pada pendapatan perkapita
2.	Badan Pusat Statistik(2021) Profile kemiskinan di Indonesia	Analisis Deskriptif	angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 adalah 26,50 juta orang atau 9,71%.

No	Peneliti dan Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3.	Shandy Jennifer Matitaputty (2020) Pengaruh pajak terhadap kesejahteraan masyarakat	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	penerimaan pajak memiliki hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin dan persentase jumlah penduduk miskin.
4.	Indah purboningtyas, dkk (2020) Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di jawa tengah	<i>Autoregressive Distributed Lag</i> (ARDL)	Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di jawa tengah.
5.	Gek Ayu Nina, Surya Dewi Rustariyuni (2018) Pengaruh gini rasio, pengeluaran makanan non makanan dan belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi Bali	Ordinary Least Square (OLS)	Gini rasio berpengaruh positif signifikan, pengeluaran non makanan tidak signifikan, belanja modal tidak berpengaruh positif dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Bali.

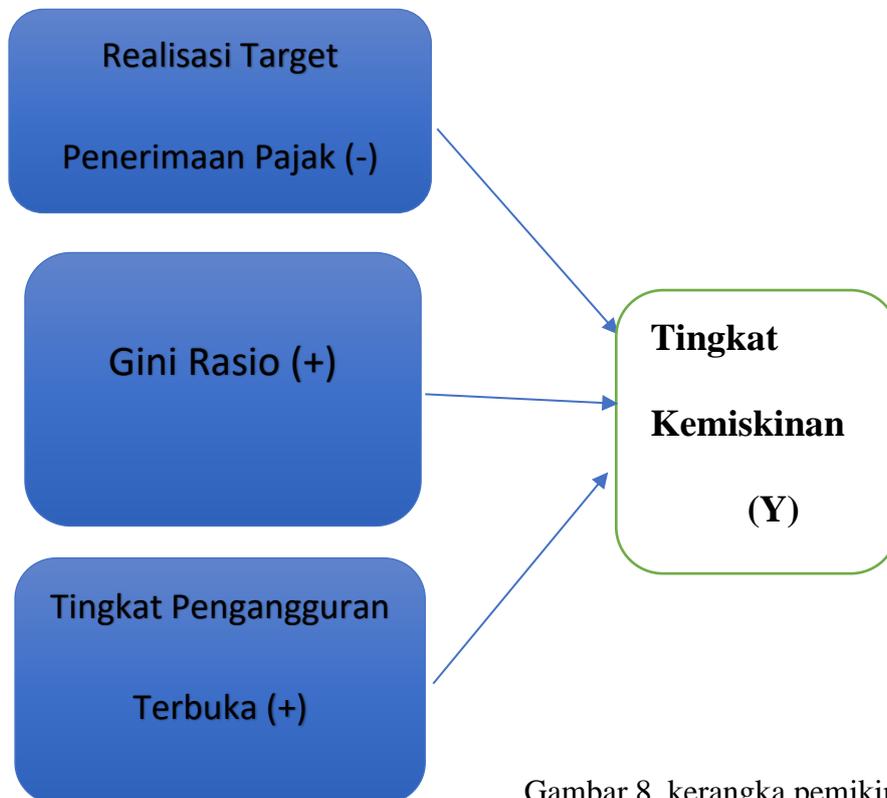
No	Peneliti dan Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6.	Diah Retno wati (2015) Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa tengah	Ordinary Least Square (OLS)	Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa tengah.
7.	Muhammad Arif (2015) Pengaruh pendapatan terhadap kemiskinan dan pengangguran dengan inflasi sebagai moderasi di Sumatera Utara	<i>Vector Error Correction Model</i> (VECM)	Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan inflasi di Sumatera utara
8.	Yulianto Kadji (2005) Kemiskinan dan konsepnya	Analisis Deskriptif	Apapun program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat.

2.3 Kerangka pemikiran

Berdasarkan penelitian Iman Akhadi (2022) Pengaruh penerimaan pajak terhadap variabel pendapatan perkapita dan angka kemiskinan sebagai indikator kemakmuran rakyat menyatakan Pajak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan penelitian Shandy Jennifer Matitaputty, dkk(2020) juga mengatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka penulis berasumsi bahwa Realisasi Target Penerimaan Pajak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Penelitian Gek Ayu Nina, Surya Dewi Rustariyuni (2018) yang berjudul Pengaruh gini rasio, pengeluaran makanan non makanan dan belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi Bali dan Muhammad Arif (2015) yang berjudul Pengaruh pendapatan terhadap kemiskinan dan pengangguran dengan inflasi sebagai moderasidi Sumatera Utara menyatakan bahwa Gini Rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Penelitian Indah purboningtyas, dkk (2020) yang berjudul Tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di jawa tengah dan penelitian Diah Retno wati (2015) Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa tengah menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan maka penulis berasumsi bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis maka terbentuk suatu konsep pendekatan yang akan digunakan sebagai acuan penelitian yang tergambar dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 8. kerangka pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kajian terdahulu dan telaah penelitian empiris yang dilakukan penulis mengenai rumusan masalah, maka penulis dapat merumuskan hipotesis tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Diduga Realisasi Target Penerimaan pajak (RTPP) berdampak negatif terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia (TK).
2. Diduga Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan/rasio gini (GR) di Indonesia dinilai berdampak negatif terhadap Tingkat kemiskinan (TK).
3. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diyakini akan berdampak positif terhadap Tingkat Kemiskinan (TP) Indonesia.
4. Diduga , penerimaan pajak (PP), rasio kesenjangan pendapatan/gini (GR), dan tingkat pengangguran yang tidak diungkapkan (TPT) secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan penduduk Indonesia (TK).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari pencapaian target pajak Indonesia (RTPP), rasio gini (GR), angka pengangguran terbuka (TPT) dan angka kemiskinan. Tahun 2000 hingga 2021, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu.go.id), Bank Dunia.

Tabel 3.1 sumber data

No	Nama Variabel	Simbol Variabel	Satuan Pengukur	Sumber Data
1	Tingkat Kemiskinan	TK	%	World Bank, BPS
2	Realisasi Target Penerimaan Pajak	RTPP	%	Kemenkeu
3	Gini Rasio	GR	%	BPS
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	%	BPS

3.2 Metode pengumpulan data

Karena metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan mencari dan memperoleh data yang mendukung penelitian melalui data dari sumber terpercaya, esai, jurnal, media cetak dan elektronik adalah penggunaan metode dokumentasi.

3.3 Definisi Operasional Variabel

1. Kemiskinan adalah contoh masalah yang timbul sebagai akibat dari masalah kependudukan, dimana seseorang atau keluarga tidak mempunyai sumber penghidupan dan/atau mempunyai sumber penghidupan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mengacu pada negara. (Lusastra dan Napitupul, 2010).

2. Prof. B. Dr H Rochmat Soemitro SH Pajak (Suandy (2011)) mendefinisikan pajak sebagai: Kontribusi publik (yang dapat dipaksakan) ke kas negara berdasarkan undang-undang tidak ditarik kembali dan dengan demikian menerima keuntungan yang dapat dilaporkan secara langsung (pertimbangan). Digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.

3. Rasio gini atau koefisien gini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu (seperti pendapatan) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif populasi. Garis diagonal mewakili kesetaraan sempurna.

Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$. A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Ketika $A=0$, koefisien Gini terdistribusi secara merata. Nilai 1 berarti ketimpangan penuh, atau ketimpangan penuh jika seluruh penduduk tinggal di satu bagian negara dan tidak ada bagian lain dari negara yang berpenduduk. Nilai 0 berarti persamaan yang tepat. Populasinya benar-benar tersebar di seluruh negeri. Oleh karena itu, semakin besar nilai rasio konsentrasi gini maka semakin besar divergensi antara sebaran penduduk dengan jumlah site.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan. Pengangguran biasanya

diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya: friksional, struktural, dan siklis.

Berdasarkan karakteristiknya, jenis-jenis pengangguran adalah:). Banyak tenaga kerja yang menganggur karena jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kemungkinan lapangan kerja di lapangan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah orang yang telah memasuki pasar tenaga kerja tetapi menganggur, sedang mencari pekerjaan, sedang bersiap untuk memulai usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan. .menunjuk orang

3.4 Metode Alat Analisis

1. Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*)

Salah satu asumsi utama dalam model ekonometrika untuk data deret waktu adalah data stasioner. Data dianggap stasioner jika memenuhi tiga kriteria. Rata-rata dan varians adalah konstan dari waktu ke waktu, dan kovarians antara dua deret waktu hanya bergantung pada jeda antara dua periode. Jika data yang digunakan dalam model tidak stasioner, Anda akan mendapatkan hasil regresi yang meragukan yang dikenal sebagai regresi palsu. Regresi miring merupakan hasil regresi dengan koefisien regresi yang signifikan dan koefisien determinasi yang tinggi, tetapi variabel dalam model tidak relevan (Widarjono, 2018).

Uji stasioneritas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji akar unit ADF atau PP. Tes ini merupakan tes yang populer dan dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller sebagai tes Augmented Dickey-Fuller (ADF). Jika data deret waktu Anda tidak stasioner dengan orde 0 $I(0)$, stasioneritas dapat diperoleh dengan mencari stasioneritas data dengan orde pada orde ke-n (*first difference* $I(1)$, $I(2)$, dan seterusnya).

Hipotesis untuk pengujian *unit root* sebagai berikut (Gujarati, 2009):

$H_0 : \delta = 0$, terdapat *unit root*, tidak stasioner.

$H_a : \delta \neq 0$, tidak terdapat *unit root*, stasioner.

2. Uji Kointegrasi

Kointegrasi adalah kombinasi hubungan linier dari variabel sementara, yang semuanya harus terintegrasi pada derajat atau urutan yang sama. Transien variabel menyiratkan kemungkinan hubungan jangka panjang antara variabel dalam sistem model koreksi kesalahan (ECM). Salah satu syarat untuk mencapai ekuilibrium jangka panjang adalah error ekuilibrium harus berfluktuasi di sekitar nol, yaitu error term harus berupa nilai data deret waktu yang stasioner.

Uji kointegrasi ini bertujuan agar semua variabel berintegrasi pada level yang sama. Metode uji berbasis residu digunakan untuk menguji kointegrasi antar variabel dalam penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik ADF untuk menguji apakah residual regresi kointegrasi stasioner. Prasyarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya adalah penggunaan model koreksi kesalahan. Sisa model harus diam pada tingkat bidang. Untuk menghitung nilai ADF terlebih dahulu, kita perlu membuat persamaan regresi kointegral dengan menggunakan metode kuadrat-terkecil biasa (Widarjono, 2018).

Jika galat ketidakseimbangan residual stasioner bertahap, kita katakan bahwa variabel dalam persamaan regresi tersebut membentuk hubungan kointegrasi. Hipotesis uji kointegrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: $H_0: \beta = 0$, tidak terdapat hubungan kointegrasi.

$H_a: \beta \neq 0$, terdapat hubungan kointegrasi.

Kriteria pengujiannya adalah:

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika nilai kritis (critical value) $>$ ADF t-statistic.

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika nilai kritis (critical value) $<$ ADF t-statistic.

3. Error Correction Model Engle-Granger (EG)

Penelitian ini merupakan penelitian data time series dengan menggunakan pendekatan *Error Correction Model*. ECM adalah teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang. Persamaan dasar yang disusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$TK_t = \beta_0 + \beta_1 R\text{TPP}_t + \beta_2 \text{GR}_t + \beta_3 \text{TPT}_t + e_t$$

Keterangan:

TK	= Tingkat Kemiskinan(%)
β_0	= Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien dari variabel independen
RTPP	= Realisasi Target Penerimaan Pajak(%)
GR	=Gini Rasio (%)
TPT	=Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
ECT	= <i>Error Correction Term</i> (%)
e_t	= Disturbance error

4. Pengujian Hipotesis

1. Uji t-Statistik

Dalam penelitian ini, kami menggunakan uji t-statistik untuk menguji validitas hipotesis kami dan menentukan signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel lain konstan. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, maka harus diuji dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, sehingga menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

a. Pengaruh Realisasi Target Penerimaan Pajak terhadap Tingkat Kemiskinan

$H_0 : \beta_1 > 0$ menunjukkan bahwa Realisasi Target Penerimaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

$H_a : \beta_1 < 0$ menunjukkan bahwa Realisasi Target Penerimaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

b. Pengaruh Gini Rasio terhadap Tingkat Kemiskinan

$H_0 : \beta_2 < 0$ menunjukkan bahwa Gini Rasio tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

$H_a : \beta_2 > 0$ artinya terdapat pengaruh positif antara Gini Rasio dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

c. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

$H_0 : \beta_3 < 0$ menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

$H_a : \beta_3 > 0$ menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Kriteria pengujian ini adalah:

H_0 diterima jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, yang berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

H_0 ditolak jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

2. Uji f-Statistik

Uji f-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini mengkaji apakah pencapaian target penerimaan pajak, rasio gini, dan angka pengangguran yang dipublikasikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Uji f-statistik membandingkan nilai f yang dihitung dengan tabel f. H_0 ditolak jika nilai f hitung lebih besar dari f tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. H_0 diterima jika f hitung lebih kecil dari f tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesis yang akan diuji adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_a : paling tidak satu dari $\beta_k \neq 0$ dimana $k = 1, 2, 3, \dots, k$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian ini adalah:

H_0 diterima F-statistik $< F\text{-tabel}$, variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

H_0 ditolak $F\text{-statistik} > F\text{-tabel}$, variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi nilai variabel independen. Nilai R^2 yang kecil tidak berarti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi nilai variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan nilai variabel independen. Kisaran nilai untuk R^2 adalah 0 hingga 1. Jika nilai R^2 sama dengan 1, garis regresi yang dipasang dapat menjelaskan 100% variasi nilai variabel dependen. Jika R^2 sama dengan 0, berarti variabel independen yang digunakan tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang lebih baik mendekati 1.

Tabel 3.2 Interpretasi berdasarkan koefisien determinasi (R^2)

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.001 – 0.200	Sangat Lemah
0.201 – 0.400	Lemah
0.401 – 0.600	Cukup Kuat
0.601 – 0.800	Kuat
0.801 – 1.000	Sangat Kuat

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh Realisasi Target Penerimaan Pajak, Gini Rasio dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia periode 2000-2021 dengan menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM) maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa secara statistik variabel Realisasi Target Penerimaan Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dan jangka pendek berpengaruh positif signifikan namun dengan koefisien $< 1\%$. Hal ini dikarenakan masih rendahnya efek langsung yang diterima masyarakat dari peningkatan pajak.
2. Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa secara statistik variabel Gini Rasio berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia. dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa secara statistik variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kemiskinan, dan dalam jangka pendek variabel TPT berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Berdasarkan hasil estimasi secara bersama-sama semua variabel baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek berpengaruh terhadap tingkat

kemiskinan di Indonesia. Tetapi, secara individual variabel realisasi target penerimaan pajak, gini ratio dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

5. Koefisien determinasi (R^2) pada variabel penelitian realisasi target penerimaan pajak, gini ratio dan tingkat pengangguran terbuka sangat kuat yaitu sebesar 0.874108 atau sebesar 87,41% dalam menjelaskan tingkat kemiskinan di Indonesia.

5.2 Saran

Saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam mengelola pajak membutuhkan perhatian dan partisipasi dari banyak komponen termasuk masyarakat agar pengalokasiannya sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.
2. pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang menyerap pajak secara optimal dan langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan.
 - b. Memperoleh layanan kesehatan universal untuk memberi warga perlindungan dari guncangan kesehatan.
 - c. Memperbaiki kebijakan dan administrasi pajak yang memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak dari kelas menengah.
 - d. Memperkuat pemberian layanan lokal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi yang diberikan ke masyarakat.
3. Pemerintah dalam hal ini sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat disarankan melakukan Peningkatan dan standarisasi kualitas pendidikan jarak jauh Perbaikan institusi medis seperti rumah sakit dan poliklinik, perluasan tenaga medis, pemberdayaan masyarakat atau penyuluhan kesehatan. Komunitas diberikan kursus dan lembaga pendidikan tempat Anda bisa mendapatkan pekerjaan. Pemerintah dan perusahaan memberikan kesempatan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja. Negara ini memperbaiki sistem hukum dan sistem peradilan nya untuk mengurangi korupsi.

Perpindahan (migrasi) penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah padat penduduk agar terciptanya pemerataan pendapatan yang sempurna.

4. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran antara lain:
 - a. Penyelenggaraan bursa kerja, Mendorong kegiatan ekonomi informal,
 - b. Tingkatkan keterampilan tenaga kerja Anda, Meningkatkan kualitas pendidikan, Pendirian pusat pelatihan kejuruan.
 - c. diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia, tingkat perkembangan teknologi, kemampuan manajerial dan kualitas infrastruktur agar dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.
5. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat diharapkan secara berkala melakukan pengecekan program dan kebijakan secara berkala agar anggaran dan manfaat sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan agar tercapainya Indonesia yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Muhammad & Fadhilah, Diena. 2017. *Pengaruh Pendapatan Terhadap Kemiskinan dan Pengangguran dengan Inflasi sebagai Pemoderasi di Sumatera Utara*. Medan. Jurnal Iman, Vol. 5, No. 2, pp. 66-79.
- Asy'ariati, F. A., Wahyudi, H., Murwiati, A., Nirmala, T., & Yulihar Taher, A. R. (2022). *Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung*. E-Journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.23960/efebe.v1i1.23>
- Astrini, N. M. M & Purbadharmaja, I. B. P. 2013. *Pengaruh PDRB ,Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali*. E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 2(8), 384-392.
- Bidarti, Agustina. 2020. *Teori Kependudukan*. Bogor: LINDAN BESTARI.
- Budhi, M. K. S. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 6(1), 1-6
- Dewi, N. 2017. *Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*. Jurnal online mahasiswa Fakultas Ekonomi, 4(1), 870-881.
- Elia, N., & Marselina, M. (2023). *Tingkat Pengangguran Berdasarkan Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, dan Investasi Asing di Indonesia Tahun 1996-2020*. Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 1(2), 123–135. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i2.1391>
- Gunarto, T., Marselina, M., & ... (2022). *Determinants of Poverty in 10 Provinces in Sumatra Island*. International Journal of ..., 2022(3), 1306–1320. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/6179><https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/download/6179/2621>
- Gujarati, D. N. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanke, J.E. & Wichern, D.W. (2005). *Business Forecasting Eight Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Iman, Akhadi. 2022. *Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan sebagai indikator Kemakmuran*

Rakyat. Jurnal Pajak Indonesia. Indonesian Tax Review.

- Kumalasari, M. 2011. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita, Jumlah Penduduk miskin Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Kadji, Yulianto, 2005. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG.
- Karl E .1999. *Case & Fair*. Jakarta. Erlangga
- Kuncoro. 2006. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Liputo, S. (2014). *Distres psikologik dan disfungsi sosial di kalangan masyarakat miskin kota malang*. *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi*, 2(3), 286–295
- Matitaputty, S. J., Sugiarto, A., Christy, A. A. M., & Hastuti, P. R. (2021). *Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Perspektif Akuntansi*, 3(3), 253–269. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i3.p253-269>
- Mankiw, N. G. 2011. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat
- Markum. (2009). *Pengentasan Kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial*. Psikobuana. 1-12
- Nina, Gek Ayu. & Rustariyuni, Surya Dewi. 2018. *Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non-makanandan Belanja Modal terhadap Tingkat Kesejahteraan di Provinsi Bali*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana Bali.
- Prachowny, M.F.J. 1993. Okun's Law: Theoretical Foundations and Revisited Estimates, *Review of Economics and Statistics*, 75, 331-335.
- Prachowny, M.F.J. 1993. Okun's Law: *Theoretical Foundations and Revisited Estimates, Review of Economics and Statistics*, 75, 331-335.
- Pratowo, N. I. (2013). *Analisis FaktorFaktor Yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 1(1), 15–31.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Peneitian*. Editor : Endang Mulyatiningsih, M. Pd. Penerbit : CV ALFABETA.
- Purboningtyas, Indah, dkk. 2020. *Analisis Pengaruh Tingkat PengangguranTerbuka dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tenngah*. Universitas Muhammadiyah Semarang. Jurnal Saintika UNPAM.
- Putra, L. D. 2011. *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.

- Retnowati, Diah. & Harstuti. 2015. *Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto.
- Riadi, Muchlisin. (2020). Pengertian dan Jenis-jenis Variabel Penelitian. Diakses pada 8/19/2022, <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/pengertian-dan-jenis-variabel-penelitian.html>
- Rusastra, I. W., & Napitupulu, T. A. (2010). *Karakteristik Wilayah Dan Keluarga Miskin Di Pedesaan: Basis Perumusan Intervensi Kebijakan*.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Menangani Kemiskinan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Santiso, Carlos. 2001. *Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality*. The Georgetown Public Policy Review Volume 7 Number 1 .
- Soegijoko. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Supriatna, Tjahya, 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan. Bandung*. Humaniora Utama Press (HUP).
- Syawie, M. 2012. *Ketimpangan Pendapatan dan Penurunan Kesejahteraan Masyarakat*. *Informasi*, 18(2), 95-104.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, Agus. 2018. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta:UPP STIM YKP
- BPS.2021. Profil Kemiskinan. Jakarta. Indonesia. www.bps.go.id. diakses 12 Agustus 2021, pukul 21.25
- Wikipedia. 2012. *Definisi Kemiskinan*. Tersedia dalam <http://www.Wikipedia.htm> (on line) diunduh tanggal 1 Oktober 2012.
- World Bank.1990-2021. Data Ekonomi. www.worldbank.org. diakses pada 13 agustus 07.30
- World Bank. 2010. "Poverty" Project Appraisal Document 22110. Washington, D.C.
- Undang-undang No.28 tahun 2007 Tentang Perpajakan. www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007. Diakses pada 03 oktober 2021.